

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Muara dari hal tersebut adalah tingkat pelayanan pemerintah daerah yang maksimal kepada masyarakat (Zuliarti,2012).

Menurut Mardiasmo (2002), beberapa misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah: pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik telah mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini merupakan pengawasan (monitoring) dan pelaporan pencapaian suatu program yang dilakukan secara terus-menerus, khususnya penilaian kemajuan pencapaian program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan semula (Nurkhamid, 2008).

Mardiasmo (2004:121), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan

untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan per-tanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.

Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah. Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan

kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui tujuan utama sector publik adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) bukan untuk memaksimalkan laba (Bastian, 2006).

Dalam era reformasi sekarang ini, isu tentang pemberian pelayanan publik semakin mencuat kepermukaan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat keberadaan manusia yang semakin maju, dimana pemberian pelayanan yang baik oleh lembaga atau instansi pemberi pelayanan merupakan kata kunci yang tidak bisa ditawar lagi (Jonathan, 2004).

Selain *good governance*, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah pengendalian intern. Dengan dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kinerja organisasi. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas pengendalian intern suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan, dan kualitas pengendalian intern yang baik dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian intern yang buruk dapat mendorong kinerja organisasi semakin memburuk.

Di samping itu, permasalahan terkait penaksiran risiko dan pemantauan instansi, evaluasi dan pengawasan baik dari atasan maupun instansi lain berkepentingan, yang seharusnya dilakukan secara berkala terkadang tidak tepat waktu. Agar Pengendalian Internal berjalan dengan efektif sehingga organisasi terhindar kemungkinan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

Kinerja Pegawai, termasuk pegawai bidang keuangan memiliki peran yang penting bagi Pemerintah Daerah, terutama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dewasa ini, *Good Governance* digunakan sebagai alat ukur untuk menilai Kinerja Pegawai dan organisasi pemerintah, yang lebih menekankan pada aspek transparansi, akuntabel, serta kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang ekonomis, efektif, dan efisien. Apabila pegawai bidang keuangan dinas daerah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, maka sesuai dengan prinsip *Good Governance*, informasi keuangan akan dihasilkan dengan baik, transparan, dan akuntabel (Fierda Pangestika, 2016).

Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan tentunya akan meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Ulfa Fimela (2011) meneliti tentang pengaruh *good governance*, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik pada

Kabupaten kampar, hasil penelitiannya juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara *good governance*, gaya kepemimpinan dan komitmen terhadap kinerja sektor publik.

Kemudian Rindu Suciati (2013) juga meneliti tentang pengaruh *good governance*, pengendalian intern, dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (survey pada satuan kerja pemerintah daerah Bengkalis). Hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan bahwa pelaksanaan *good governance* dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, artinya apabila pelaksanaan *good governance* dan pengendalian intern dilaksanakan secara bersamaan dengan baik maka kinerja organisasi pada daerah kota bengkalis akan meningkat. Kemudian secara parsial, pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan *good governance* dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Nur Azlina (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Pelalawan,

Wala Siti Nurlaela (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh *good government governance* dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah (survei pada skpd kabupaten Ciamis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good governance* dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Fierda Pangestika (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal, *good governance*, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, *good governance*, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah kabupaten Temanggung.

Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Rindu Suciarti (2013) menunjukkan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Bengkalis, sedangkan pada penelitian Wala Siti Nurlaela (2015) menemukan bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nur Azlina (2014) mengenai Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada variabel independen yang mana pada penelitian ini menambahkan variabel kompetensi pada variabel independen. Selain itu perbedaan penelitian adalah pada objek penelitian yaitu studi pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi yang sebelumnya pada SKPD Kabupaten Pelalawan.

Alasan peneliti memilih Kabupaten Kuantan Singingi adalah karena masih ditemukannya masalah terkait sistem pengendalian intern oleh BPK RI, diantaranya, (1) Pengelolaan dana jamkesmas tidak melalui mekanisme APBD dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan dan operasional RSUD; (2) Penerimaan dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS) tahun 2013 pada Dinas

Perkebunan digunakan langsung untuk operasional; dan (3) Penatausahaan piutang PBB belum memadai; (4) Persiapan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menuju penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh *Good Governance* terhadap kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana pengaruh Pengendalian Internal terhadap kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ?
3. Bagaimana Pengaruh Kompetensi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ?
4. Bagaimana Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Internal, dan Kompetensi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Internal, dan Kompetensi

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.
3. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini, review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.

- BAB III :** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu lokasi penelitian, sampel dan populasi, operasional variabel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
- BAB IV :** Dalam bab ini mengemukakan gambaran umum pemerintah kabupaten Kuantan Singingi meliputi sejarah berdirinya pemerintah kabupaten Kuantan Singingi, geografis, visi dan misi pemerintahan Kuantan Singingi, dan struktur pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi.
- BAB V :** Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.
- BAB VI :** Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.